

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktuan dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Term of Reference (TOR) Kontrak Pelaksanaan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tahun 2019 – 2023, PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat*

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Eric Chandra Pradipta, 2013, “Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Heru Setiawan, 2011, “Implikasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan”, Magister Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nexxon Otopia, 2006, “Grosse Akta Notars dan Kekuatan Pembuktiannya”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Teguh Adisantosa, 2005, “Penerapan Grosse Akta Pengakuan Hutang oleh PT PLN (Persero) dalam Menjalankan Bisnis Ketenagalistrikan”, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Jamaluddin, 2011, Parate Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Aktualita, *Jurnal Untad*, Volume 6, Nomor 3.

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5530).

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/40/M.PE/1991 tentang Penyidik Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z/DIR/2006 tentang
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

D. Internet

Hamdani, Trio, 2018, Gara-gara Pencurian Listrik, PLN Hilang Pendapatan Rp
10 T, <https://finance.detik.com/energi/d-3988976/gara-gara-pencurian-listrik-pln-hilang-pendapatan-rp-10-t>, diakses 13 Juni 2019, pukul 20.00 WIB.

Siregar, P.A.S., 2018, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi terhadap
Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah, Ed.1, Cet.1. Yogyakarta:
Deepublish, <https://books.google.co.id/books> hlm. 5 diakses 14 Juni
20.34 WIB.

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.